November 2013 Edisi 11/NL/11/2013

Daftar Isi:

Hal

1. Mentan: "Jadikan Aksi Bukittinggi Sebagai Budaya".....1
2. Pentingnya Penggunaan BBN Tanpa Harus Konversi Lahan Pangan.....3
3. PENAS Jadi Ajang Belajar Para Petani dan Tumbuhkan Kesadaran Agrobisnis Petani....4
4. Peluang Usaha Di Sektor Pangan Masih terbuka 6
5. Menteri Pertanian Mengajak Petani Memprioritaskan Tanam Kedelai Karena Merupakan Pangan Strategis.....7
6. Selandia Baru Tingkatkan Investasi Peternakan Sapi, Industri Susu dan Terima Ekspor Manggis Indonesia.....8
7. Pentingnya Perda UU Perlindungan Lahan dan Penggunaan Pupuk Hayati Oleh Petani.....10

Mentan: "Jadikan Aksi Bukittinggi Sebagai Budaya"

"Tema peringatan HPS ke 33 berfokus ke arah diversifikasi pangan melalui Aksi Ketahanan Pangan Bukittinggi menjadi suatu budaya. Jika Aksi tersebut dimulai dari pimpinan daerah dengan memulai dengan diri sendiri, dan mengkampanyekan secara intensif, tentu masyarakat akan mencontohnya"

Peringatan HPS ke 33 sangat istimewa karena penyelenggaraan HPS kali ini berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya. Selain dihadiri langsung oleh Presiden RI sekaligus juga dilaksanakan rapat kabinet terbatas yang diperluas. Hal itu tidak pernah terjadi dalam sejarah peringatan HPS sebelumnya. "Pelaksanaan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) pada 2013 di Sumatera Barat berjalan sukses serta mendapat apresiasi dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal itu bentuk apresiasi terhadap Sumatera Barat," kata Menteri Pertanian, Suswono saat menutup secara resmi peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke 33 Tahun 2013 di Padang Sumatera Barat (3/11).

Menurut Mentan, apresiasi Presiden terlihat ketika berada di Padang Mangatas, Limapuluh Kota, Presiden meluangkan waktu lebih dari 1 jam untuk meninjau Pengembalaan ternak Padang Mangatas. Presiden mengintruksikan perlu adanya suatu penataan pangan nasional agar cukup sehingga pangan tidak lagi bersumber dari impor lagi. "Saat ini, penggembalaan Padang Mangatas hanya ada 600 ekor ternak, padahal kapasitasnya dapat untuk 2 ribu ternak, untuk itu Presiden telah memerintahkan agar Bappenas merencanakan kapasitas 2.000 tersebut terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pangan telah menjadi salah satu prioritas kebijakan ekonomi nasional, sebagai upaya pemerintah agar masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan paling dasar dalam berkehidupan" kata Mentan.

Mentan menjelaskan Peringatan HPS ke-33 Tahun 2013 telah memberi makna dan warna tersendiri bagi pembangunan pangan di Indonesia.

• Pengarah: Kepala Biro Umum dan Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian • Penanggung Jawab: Dr. Ir. Nani Sufiani Suhanda, M.Sc.Ag • Penyunting: Ir. Marihot H. Panggabean, M.Si
• Pelaksana: Dra. Ria Satiti Irawati, Ir. Rusman Ingguan • Anggota: Imam Santoso, SE, Alice Raga Dewi S. Sos, Ery Yuni Wijianti, SH
• Distribusi: Makmur • Nara Sumber: Pejabat Kehumasan unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
• Alamat Penerbit: Kanpus Kementerian Pertanian Gd A Lt.3 Rm 325, Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550 Telp/Fax: 021 7804457

Dari segi pemilihan temanya yaitu "Optimalisasi Sumber Daya Lokal Melalui Diversifikasi Pangan Menuju Kemandirian Pangan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat", maka berbeda dengan tema tahun sebelumnya, yang lebih mengarah kepada peningkatan produksi pangan, tema peringatan HPS tahun sekarang bergeser ke arah diversifikasi melalui optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya lokal. "Jika pada 2012, peringatan HPS difokuskan peningkatan produksi pangan, dan pada 2013 lebih bagaimana diversifikasi pangan yang menyangkut kepada pola konsumsi'. jelas Mentan.

Terkait dengan tema kegiatan, Mentan berharap agar Indonesia mampu meningkatkan pembangunan dan kemandirian pangan melalui pola konsumsi pangan beragam atau yang dikenal sebagai diversifikasi pangan. Hal ini karena setiap daerah memiliki pangan lokal dimana dengan pemenuhan pangan lokal beragam tersebut, Indonesia tidak akan kekurangan pangan. "Hendaknya konsumsi pangan beragam ini dapat dijadikan budaya. Untuk itu, pejabat daerah diminta untuk terus menggiatkan sosialisasi mulai dari diri sendiri untuk mengkampanyekan agar pangan pokok tersebut bukan hanya beras. Jadi, diversifikasi pangan tidak hanya dari beras ke non beras tetapi juga dengan meningkatkan konsumsi terhadap buah, sayur, serta protein hewani," tegas Mentan.

Mentan juga mengharapkan penyelenggaraan HPS dapat membawa dampak nyata dalam implementasi dilapangan ke depannya, sehingga keragaman pangan semakin tersedia dan mengkonsumsi beragam pangan makin membudaya. Indonesia dengan anugerah letak di daerah tropis, di mana matahari bersinar setiap hari dan memiliki sumber daya alam yang subur. Oleh karena itu, berbagai ragam hayati ada di negara ini, di samping setiap daerahpun mempunyai sumber daya pangan lokal. Kalau didayagunakan secara baik, tentunya Indonesia tidak akan kekurangan pangan. "Diharapkan kepada masyarakat agar tidak berpikir kalau pangan pokok itu beras saja, namun masih banyak keanekaragaman pangan pokok yang ada," terang Mentan

Mentan mengajak semua pihak untuk menggerakkan "Aksi Ketahanan Pangan Bukittinggi" sebagai budaya. Jika aksi tersebut dimulai dari pimpinan daerah dengan memulai dengan diri sendiri, dengan mengkampanyekan secara intensif, tentu masyarakat akan mencontohnya. Diharapkan intensifikasi pangan tidak hanya beralih dari karbohidrat yang satu dengan yang lain, dari beras ke non-beras. Tentunya Intensifikasi ditunjang dengan meningkatkan pangan sayur dan buah-buahan, juga protein hewani dan botani, agar generasi mendatang lahir menjadi generasi yang cerdas. "Kementerian Pertanian telah melakukan evaluasi pencapaian target-target yang ditetapkan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai upaya terobosan dan refokusing untuk menjamin pemenuhan konsumsi pangan masyarakat. Harapan besar tentunya diperlukan kontribusi dan peran serta seluruh pemangku kepentingan termasuk petani dan nelayan, sesuai tema peringatan HPS, untuk keberhasilan langkah tersebut" papar Mentan.

Mentan memaparkan beberapa permasalahan telah muncul dan sempat menjadi *trending topic* di media cetak dan elektonik dan media sosial. Mengingat masalah pangan cukup kompleks dan bertali temali, tidak saja dari sisi suplly dan demand melainkan juga pada aspek mata rantai distribusi, pemasaran, dan juga harga."Petani masih mengeluhkan harga yang tidak stabil sehingga tidak menikmati penghasilannya dengan baik. Kemandirian pangan dapat disediakan secara baik oleh oleh petani. Untuk itu, petani yang sudah menyediakan kebutuhan pangan untuk masyarakat luas ini harus disejahterakan. Kita berterima kasih kepada petani yang telah bekerja keras untuk memberikan pangan untuk masyarakat Indonesia. Bahkan Indonesia mendapat penghargaan dari FAO, telah mampu mengurangi kelaparan." ujar Mentan.

Mentan menerangkan perlunya kontribusi pemangku kepentingan, termasuk petani dan nelayan, untuk terus bekerja keras, dan tentu tidak kalah penting peran dari pemerintah daerah untuk memerhatikan nasib mereka. Kepala daerah, Bupati dan Walikota harus terus membantu dalam memasarkan hasil produk pertaniannya, jangan dikecewakan dengan harga yang murah. "Dinas perdagangan setempat perlu mendukung petani, sebagai contoh di daerah Bantul, pemerintah daerah menyisihkan APBD Rp 5 miliar untuk menanggulangi harga bawang merah dan cabe jatuh. Jadi melalui BUMD jika harga jatuh, dibeli oleh Pemda. Ini hanya untuk menggertak pedagang, agar petani tidak dipermainkan pedagang." jelas Mentan.

Dengan kegiatan HPS tersebut, Mentan juga berharap agar petani lokal menjadi sejahtera dan swasembada pangan terpenuhi. Dalam rangka pemenuhan pangan, Kementerian Pertanian telah menetapkan 5 (lima)

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

komoditas strategis nasional yaitu: beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi melalui program swasembada dan swasembada berkelanjutan. Hingga saat sekarang, lahan yang tersedia untuk meningkatkan produksi pangan masih cukup banyak terutama untuk lima bahan pokok. "Misalnya lahan yang tersedia di Kalimantan Timur cukup luas yaitu sekitar 155 ribu ha lahan transmigrasi, rencananya akan ditanami kedelai. Selain lahan untuk tanaman 5 komoditas, kita juga punya potensi lahan pekarangan sekitar 10 juta ha yang bisa dimanfaatkan. Perlu diketahui, jika kita manfaatkan lahan pekarangan ini maka pengeluaran keluarga bisa dihemat antara Rp 150 ribu hingga Rp 800 ribu/bulan, Dengan potensi pekarangan di Indonesia, mencapai 10 juta hektar. Ini cukup menantang untuk terus kita dayagunakan, PKRPL pun akan terus kita galakan, Sekarang ada 12 ribu desa yang sudah memanfaatkan pekarangan ini untuk model ketahanan pangan berbasis rumah tangga" kata Mentan.

Sedangkan diperkotaan pekarangan sudah sempit, maka dapat dilakukan pertanian diatas rumah, karena kuncinya asalkan matahari dapat menyinari pekarangan. Dari hasil kajian ekonomi dengan rumah pangan lestari, bisa menghemat pengeluaran keluarga dari Rp. 150 ribu hingga Rp. 800 ribu/bulan. Dengan lahan yang kecil, bisa menambah penghasilan hingga Rp 1,5 juta." Kita bangga dan senang, gelar teknologi yang kita lakukan pada HPS 2013 di Sumatera Barat mendapat kunjungan 5000 orang setiap harinya. Ini sebagai salah satu contoh pemenfaatan perkarangan rumah tempat tinggal, sesempit apapaun pekarangan, jika didayagunakan dengan baik, maka bisa memperkuat ketahanan pangan berbasis rumah tangga" kata Mentan.

Pentingnya Penggunaan BBN Tanpa Harus Konversi Lahan Pangan

"Pentingnya penggunaan bahan bakar nabati (BBN), selain memberikan efek yang baik, yaitu peningkatan kemandirian pengelolaan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pemanfaatan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Tetapi diharapkan kewajiban pemanfaatan BBN tidak mengganggu lahan pangan"

Saat sekarang Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia. Produksi Indonesia pada tahun 2013 diramalkan lebih dari 25 juta ton, bahkan bisa mencapai 30 juta ton.Untuk itu Pemerintah RI terus komitmen menggenjot konsumsi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di dalam negeri, khususnya dalam upaya diversifikasi energi melalui penggunaan Bahan Bakar Nabati atau biofuel. "Dewan Energi Nasional memandang bahwa pemanfaatan nabati adalah sumber energi yang penting dan bernilai strategis untuk meningkatkan ketahanan energi nasional," kata Menteri Pertanian, Suswono, seusai sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Kanpus Kementan (8/11).

Sidang DEN ke 11 yang mengangkat tema biodiesel, Mentan mengatakan bahwa pihak Dewan Energi Nasional memandang pentingnya bahan bakar nabati. Selain itu, pemanfaatan BBN juga bisa memberikan efek yang baik, yaitu peningkatan kemandirian pengelolaan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pemanfaatan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Dalam sidang tersebut juga membentuk kelompok kerja (pokja) yang bertujuan untuk mengoptimalisasi realisasi perencanaan untuk program pemanfaatan realisasi BBN. dan dirumuskan langkah untuk mendorong penyediaan bahan bakar nabati melalui pemberian insentif, perbaikan harga, dan perlindungan petani.

Mentan mengatakan pihaknya mendorong beberapa hal yaitu **Pertama** pelaksanaan Instruksi Presiden

No 4 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati atau Biofuel. Dilanjutkan dengan penyediaan BBM secara berkelanjutan, penyediaan lahan dan tanaman baru, dan perbaikan kebijakan harga dan insentif.

Kedua Perlindungan petani penghasil bahan baku Bahan Bakar Nabati, yang meliputi percepatan persediaan infrastruktur blending dan percepatan transportasi untuk pemenuhan pelayanan di seluruh wilayah Indonesia, penerapan kewajiban penyediaan BBN dan produksi dari dalam negeri. Kemudian, menjamin mutu BBN untuk perlindungan konsumen, mengurangi hambatan produksi bioetanol, dan penyiapan program jangka panjang.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan konsumsi bioenergi di dalam negeri. Melalui upaya itu diharapkan ketergantungan Indonesia terhadap ekspor minyak sawit mentah (CPO) sebagai sumber devisa bisa ditekan."Apabila kebijakan pemerintah yang menetapkan penggunaan 10 persen biofuel untuk campuran solar berjalan baik, maka konsumsi biofuel bisa mencapai 30 persen atau sekitar 3 juta ton dari volume ekspor CPO selama ini berkisar 18-19 juta ton. Dengan mandatory 10 persen saja, maka akan terjadi pemanfaatan komoditas sawit sebesar 5 juta ton, dari total 18 juta ton sawit yang diekspor." kata Mentan.

Menurut Mentan, mandatori biosolar saat sekarang baru 10%, namun ke depan akan terus ditingkatkan. Jika hal itu dapat dilaksanakan maka dapat menyerap 5 juta ton atau 30% dari total ekspor CPO nasional yang mencapai 18 juta ton pada tahun lalu. Hal itu tentu saja akan berpengaruh signifikan terhadap harga CPO di pasar internasional. "Ini sangat signifikan berpengaruh pada harga CPO internasional. Kalau konsumsi domestik bisa digenjot, ke depan kita tidak akan lagi menjadi penerima harga lain (*price taker*) di pasar internasional, dan hal ini sangat berdampak positif bagi kita. Kalau volume CPO terus meningkat untuk konsumsi domestik bagi produksi bioenergi, ke depan kita bisa jadi price thicker di pasar global," kata Mentan.

Mentan juga mengemukakan bahwa pengembangan bahan bakar nabati masih terkendala minimnya lahan, umtuk itu dianjurkan agar lahan terlantar di Indonesia yang luasnya mencapai 7,2 juta hektare (ha) bisa digunakan baik untuk pertanian pangan atau tanaman biofuel. Dari lahan tersebut total areal yang berpotensi sebanyak 4,8 juta ha dan untuk pertanian 600 ha. Salah satu yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman biofuel adalah lahan bekas pertambangan. "Pengembangan tanaman penghasil biofuel terkendala lahan sehingga pembukaan lahan baru sangatlah penting. Saat ini tengah dikaji pemanfaatan lahan bekas tambang yang dinilai cukup luas untuk pengembangan bahan bakar nabati. Kami belum ada data pastinya mengenai luasan lahan bekas tambang tersebut, nanti tugas Pokja yang akan mendata. Kami akan minta agar petani mau memanfaatkan lahan-lahan marjinal tersebut,"ujar Mentan.

Pada konperensi pers itu, Mentan berharap kewajiban pemanfaatan BBN tidak mengganggu lahan pangan. Pasalnya, peningkatan produksi satu komoditas perkebunan berpotensi menggerus lahan pertanian. "Walaupun kita mengalami masalah dengan ketersediaan lahan, tetapi kita tidak ingin terjadi konversi dari lahan pangan menjadi lahan sawit. Untuk itu perlu ada penambahan lahan baru untuk mendukung penyediaan bahan bakar nabati, pengembangan tanaman untuk bahan bakar nabati akan memanfaatkan lahan bekas tambang yang belum didayagunakan. Tanaman seperti kemiri sunan bisa tumbuh di lahan eks tambang." kata Mentan.

Mentan mengaku belum memiliki data potensi lahan bekas tambang yang bisa didayagunakan. Tetapi Tim Pokja yang akan melakukan pendataan luas lahan tersebut. Agar menghindari tumpang tindih lahan pangan dan lahan untuk pemanfaatan biofuel, maka akan dilakukan pemetaan lahan tanaman pokok."Ke depan akan ada pemetaan lahan,sehingga ada semacam kepastian lahan tanaman pokok dengan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jadi kami harapkan undang-undang ini betul-betul dijalankan Bupati/Walikota dengan keluarnya Perda penetapan lahan pangan berkelanjutan," ujar Mentan.

Menurut Mentan, ketersediaan lahan menjadi masalah utama untuk komoditas pangan. maka itu dalam rapat DEN ke 11 telah ditetapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) tersendiri untuk menangani hambatan-hambatan yang ada beserta rekomendasinya. Pokja tersebut akan memberikan rekomendasi terutama terkait insentif dan persoalan keterbatasan lahan agar pemanfaatan biofuel tidak mengganggu lahan pangan pokok. "Jangan sampai biofuel membuat para petani mengkonversi lahan tanaman pokok ke tanaman untuk bahan bakar nabati. Ini yang kami harapkan jangan sampai terjadi Jadi kita berharap nanti Kelompok Kerja (Pokja) DEN yang mengatasi persoalan tersebut, dan mereka bisa memberikan rekomendasi agar jangan sampai pengembangan BBN mengganggu pangan pokok," ujar Mentan .

PENAS Jadi Ajang Belajar Para Petani dan Tumbuhkan Kesadaran Agrobisnis Petani

"Acara Penas merupakan ajang berkumpul para kontak tani nelayan dan hutan untuk saling memperlihatkan pencapaiannya selaku pelaku utama dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Sehingga menjadi motivasi dalam menumbuhkan kemandirian bertani dan kesadaran agrobisnis di kalangan petani"

Petani dan nelayan dari suatu daerah ke daerah lain mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan bertemu dan dapat berinteraksi secara langsung pasti akan memberikan sesuatu yang positif. Untuk itu pemerintah berencana menyelenggarakan Forum yang dinamai Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XIV 2014 bertemakan "Kita Wujudkan Petani Nelayan Yang Mandiri dan Sejahtera" yang akan berlangsung di Kabupaten Malang, Jawa Timur, 7 sampai 12 Juni 2014.

PERPUSTAKAAN PERTANIAN NASIONAL KEMENTERIAN PERTANIAN

"Dengan saling tukar informasi secara langsung untuk saling belajar sesama petani dari berbagai daerah karena masing masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Interaksi ini secara langsung pasti akan ada hal positif yang mereka dapatkan. Selain itu Petani bisa mendapatkan teknologi terbaru yang bisa digunakan untuk meningkatkan hasil produksinya" kata Menteri Pertanian Suswono saat usai menggelar Rapat Koordinasi guna mempersiapkan penyelenggaraan Pekan Nasional (PENAS) petani nelayan XIV tahun 2014 di Kanpus Kementan (6/11).

Menurut Mentan masih ada daerah-daerah yang masih sangat tradisionil. Tentu dengan ada gelar teknologi, petani dan nelayan bisa melihat ada sesuatu yang positif. Dengan mereka mengunjungi suatu daerah ini sesuatu pengalaman pembelajaran yang luar biasa. Petani dari daerah terpencil seperti Nusa Tenggara atau Aceh, saat ke Jawa dapat menyaksikan areal-areal di Jawa yang tentu saja sangat berbeda dengan daerahnya. Setidaknya 35.000 pemangku kepentingan sektor pertanian dan perikanan akan berinteraksi memperkuat sistem agribisnis nasional."Dengan adanya PENAS, diharapkan para petani bisa berdiskusi, apalagi dalam forum Penas 2014 ini akan digelar teknologi dimana petani bisa menyaksikan langsung secara fisik, dan bisa belajar maupun mengikuti proses magang.yang berdampak positip. Jangan bayangkan petani ini seperti petani yang ada di Pulau Jawa atau petani-petani yang berasal dari daerah yang maju," kata Mentan.

Hal-hal seperti itu pasti akan memberikan dampak positif. Pengalaman lapangan, sesuatu yang mahal. Oleh karena itu Penas Petani Nelayan XIV 2014 masih diperlukan secara periodik antara 3 sampai 4 tahun. Penas yang diselenggarakan secara periodik merupakan suatu media yang sangat positif. "Forum PENAS nanti sejatinya akan menjadi wahana diskusi dan transfer ilmu bagi petani dan nelayan dari berbagai daerah dan diharapkan pelaksanaan penas berjalan dengan baik. Penas merupakan forum petani dan nelayan termasuk petani hutan untuk melakukan konsolidasi promosi hasil perikanan dan kehutanan secara periodik," kata Mentan.

Dalam kegiatan PENAS diharapkan akan terjadi interaksi di antara pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan pemangku kepentingan pembangunan pertanian, baik pemerintah, pengusaha pertanian swasta, BUMN, pakar dan pemerhati pertanian serta lembaga penelitian.

"Penas Petani Nelayan Indonesia merupakan ajang berkumpul dan bersilaturahmi para kontak tani nelayan dan hutan untuk saling memperlihatkan pencapaiannya selaku pelaku utama dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Hal itu dapat dimanfaatkan petani untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di pedesaan," kata Mentan.

Mentan memaparkan bahwa PENAS 2014 juga akan mempertemukan antara petani-nelayan andalan Indonesia dengan petani di kawasan Asean."Tukar menukar informasi dan pengalaman serta kerjasama dalam pembangunan ekonomi usaha kecil diperlukan untuk menemukan resolusi menghadapi krisis ekonomi global," ujar Mentan.

Mentan mengharapkan pada acara Penas nanti akan menumbuhkan kemandirian bertani dan mampu menumbuhkan kesadaran agrobisnis di kalangan petani. Pertanian sejatinya bukan lagi hal pekerjaan yang diwariskan namun menjadi bisnis yang menguntungkan. Untuk itu PENAS harus dipersiapkan sebaiknya untuk bisa dimanfaatkan guna membangkitkan motivasi dan kemandirian, "Saya menilai kesadaran petani untuk melakukan usaha pertanian dengan pendekatan agrobisnis masih rendah. Terbukti kegiatan pertanian yang dilakukan petani saat ini masih berdasarkan pada kebiasaan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

turun-temurun atau "agriculture". Petani hanya sekedar budi daya saja, berdasar kebiasaan yang diwariskan belum berpikir agrobisnis," kata Mentan.

Mentan mencontohkan, di sektor peternakan para peternak masih menganggap hewan ternak sebagai tabungan, sehingga saat tidak membutuhkan uang mereka tidak akan menjualnya meskipun harga di pasaran bagus. Sebaliknya, saat mereka membutuhkan uang maka dijuallah ternaknya meskipun harga di pasaran rendah. "Tanpa adanya kesadaran beragrobisnis dalam melakukan kegiatan pertanian, menjadikan petani di dalam negeri sulit bersaing dengan petani luar terlebih lagi di era pasar bebas. Oleh karena itu perlu ditumbuhkan kesadaran beragrobisnis di kalangan petani, terlebih lagi dengan sumber daya manusia, teknologi serta lahan yang terbatas," kata Mentan.

Peluang Usaha Di Sektor Pangan Masih Terbuka

"Peluang usaha di sektor pangan masih sangat terbuka dan perlu dukungan semua pihak. Para pengusaha yang tergabung di Kadin dapat melakukan investasi di sektor pangan dan investasi di sektor pangan tidak akan rugi, karena kebutuhan pangan terus meningkat"

Kementerian Pertanian mengajak dan menawarkan usaha pengembangan sektor pangan kepada kalangan pelaku usaha yang juga anggota Kamar Dagang dan Industri (kadin) Indonesia untuk mengembangkan usaha di sektor pangan. karena masih banyak potensi yang perlu digarap dan harus dimaksimalkan.

"Peluang usaha di sektor pangan seperti pada komoditas beras, kedelai dan jagung masih sangat terbuka dan perlu dukungan semua pihak. Selain itu, pasokan daging sapi juga masih kurang sehingga pemerintah masih perlu mendatangkan sapi dari luar negeri. Hal itu membuktikan bahwa sektor pangan nasional masih memerlukan pengembangan agar ketahanan pangan nasional menjadi semakin kuat," kata Menteri Pertanian, Suswono dalam rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) se-Indonesia di Palembang, (1/11).

Menurut Mentan, sektor pangan yang masih menjadi perhatian khusus di antaranya beras, keledai dan jagung, Untuk kedelai memang masih mengalami kekurangan akibat pengembangan komoditas tersebut membutuhkan proses panjang dengan biaya mahal. "Sebelumnya harga kedelai masih murah sehingga petani kurang tertarik untuk menekuni budidaya jenis tanaman tersebut. Namun, sekarang ini harga kedelai cukup tinggi sehingga peluang untuk mengembangkan komoditas tersebut ke depannya lebih bagus" kata Mentan.

Mentan menjelaskan, dengan lahan yang ada sekarang saja, produksi pangan belum dapat memenuhi kebutuhan. Sehingga untuk sejumlah komoditas seperti kedelai dan gula pasir impornya masih besar. "Untuk mencapai target swasembada pangan, kita memerlukan tambahan lahan yang cukup besar. Sehingga lahan yang ada sekarang perlu ditambah, bukannya malah dikurangi dengan tindakan alih fungsi," tandas Mentan.

Mentan kembali mengingatkan derasnya laju alih fungsi lahan pertanian di daerah-daerah. Setiap tahun sekitar 100.000 hektare lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan komersial nonpertanian. Sementara kemampuan pemerintah mencetak sawah baru hanya 40.000 hektare per tahun. Jika tidak ada upaya untuk menghentikan laju alih fungsi ini, ketahanan pangan nasional akan terancam. "Kementerian Pertanian membutuhkan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengamankan lahan pertanian potensial dari alih fungsi ke penggunaan non pertanian. Bentuk dukungannya adalah meminta pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota menerbitkan Peraturan Daerah untuk menindaklanjuti penerapan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan" ujar Mentan.

Lebih lanjut Mentan mengusulkan agar perluasan lahan pertanian dapat dijadikan salah satu indikator untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Jika hal ini dapat dilakukan, maka upaya Kementan dalam penyediaan lahan baku dan peningkatan nilai tambah di level petani dapat dilaksanakan.

Mentan juga mengajak para pengusaha yang tergabung di Kadin untuk melakukan investasi di sektor pangan dan menjamin investasi di sektor

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

pangan tidak akan rugi, karena kebutuhan pangan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk."Harga pangan cenderung terus meningkat mengikuti hukum pasar. Era pangan murah, ke depan tidak akan ada lagi. Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan akan pangan, harga pangan akan cenderung meningkat, sehingga harga pangan tidak akan murah lagi," ungkap Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengatakan, pihaknya akan membantu pendanaan dalam mengembangkan usaha pangan. Hal itu karena pihaknya ada anggaran bantuan permodalan terutama untuk usaha kecil dan menengah serta koperasi. Terkait bantuan permodalan untuk Kadin, Meneg Koperasi dan UKM menegaskan belum ada, karena kucuran dana hanya untuk usaha kecil dan koperasi. Namun, bila Kadin memiliki usaha di sektor riil dan

koperasi pihaknya siap memberikan bantuan. Mengenai jumlah usaha kecil yang ada sekarang hanya sekitar 56,5 juta unit dan koperasi lebih kurang 34 juta unit tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri Pertanian Mengajak Petani Memprioritas Tanam Kedelai Karena Merupakan Pangan Strategis

"Target pemerintah untuk produksi kedelai sebesar 1,5 juta ton dalam tempo 3 tahun, maka disediakan 1 juta hektar lahan untuk ditanami kedelai pada kawasan transmigrasi yang tersebar di 26 provinsi se-Indonesia. Pemerintah juga memberi kepastian terserapnya produksi bagi para petani dan dengan dibuat HPP kedelai, agar petani bergairah menanam kedelai"

Hingga saat sekarang kebutuhan konsumsi kedelai di masyarakat mencapai 1,2 juta ton per tahun. Sementara produksi kedelai nasional baru mencapai 900 ribu ton. Dengan demikian Indonesia masih terus melakukan impor guna memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri. Untuk itu, Menteri Pertanian mengajak para petani untuk memprioritaskan menanam kedelai karena merupakan salah satu pangan strategis nasional. "Kedelai itu pangan nasional dan mayoritas masyarakat juga mengonsumsi komoditas tersebut. Karena itu saya juga mendorong para petani untuk menanam kedelai di samping padi, dan jagung," kata Menteri Pertanian, Suswono saat melakukan Panen Raya Kedelai hasil konsorsium pupuk hayati unggulan nasional seluas 300 hektar di Desa Sidumulyo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, (2/11).

Menurut Mentan, pemerintah telah menargetkan produksi kedelai sebesar 1,5 juta ton dan diharapkan dapat tercapai dalam tempo 3 tahun. Agar target tercapai, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyediakan 1 juta hektar lahan untuk ditanami kedelai di kawasan transmigrasi yang tersebar di 26 provinsi se-Indonesia. "Pada musim tanam tahun 2013/ 2014 ini, pemerintah menyediakan lahan seluas 155 ribu hektar dengan target produksi sebanyak 225 ribu ton. Pada tahun 2014 dan 2015 akan dibuka lahan seluas 400 ribu hektar dengan target produksi

sebanyak 600 ribu ton. Selanjutnya dibuka 450 ribu hektar target produksi sebanyak 675 ribu ton. Penyediaan lahan ini guna mengurangi ketergantungan impor kedelai" ujar Mentan.

Mentan mengaku dirinya cukup senang dengan Panen Raya Kedelai yang diselenggarakan di Mojokerto, karena berdasarkan laporan produksi kedelai di daerah tersebut mencapai 2,4 juta ton dengan lahan yang ada. Mengingat selama ini produksi kedelai dari 1 hektare lahan hanya mencapai 1,3-1,4 juta ton. Padahal di negara-negara subtropis mampu memproduksi dari 1 hektare lahan dapat mencapai 3-4 juta ton.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

"Biasanya produksi kedelai dari 1 hektare dapat mencapai 3 juta ton memiliki waktu panen mencapai enam bulan di negara subtropis. Sementara lahan di dalam negeri bisa langsung dipanen dalam jangka waktu tiga bulan. Ini masalah produksi dan produktivitas. Sebenarnya kita tidak kalah dengan negara-negara subtropis lainnya. Dengan demikian sebenarnya kita bisa bersaing. Pemerintah perlu mendorong petani agar mau memproduksi kedelai agar swasembada kedelai juga tercapai" ucap Mentan.

Agar impor kedelai bisa dikurangi, Mentan mengajak petani untuk bersemangat menanam kedelai dan mengingat bahwa beragamnya kualitas kedelai petani menyebabkan berbedanya harga kedelai yang diterima, oleh karena itu, petani dianjurkan segera menggunakan PHUN karena sudah terbukti secara nyata mampu meningkatkan produksi dan kualitas kedelai, mengurangi penggunaan pupuk anorganik, serta menyembuhkan lahan yang lagi sakit. Dengan penggunaan pupuk hayati diharapkan petani bisa bersaing, dan itu sudah diterapkan di sini. "Manfaat pupuk hayati sendiri sesungguhnya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang mampu meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman." ucap Mentan.

Mentan menjelaskan bahwa Pemerintah akan memberi kepastian terserapnya produksi bagi para petani yang bersedia menanam komoditas kedelai dan Mentanpun berjanji akan menjaga harga bagi petani karena faktor keengganan para petani untuk menanam kedelai lantaran dari segi harga tidak terlalu menguntungkan. Namun dengan ditetapkan Harga Pembelian (HPP) kedelai sebesar Rp7.000-8.000 per kilo gram (kg) diharapkan para petani memasukkan komoditas kedelai untuk ditanam. "Kementan mengharapkan dengan dibuat HPP kedelai, maka gairah petani untuk menanam kedelai cukup besar. Kalau harganya sudah internasional. Tentu para petani juga pasti akan mau. " tutur Mentan.

Selain telah ditetapkannya kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kedelai sebesar Rp7.000-7.500. maka Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) juga siap menampung pasokan produksi kedelai para petani. "Pemerintah sudah menetapkan bahwa Kepmen Perdagangan telah memberikan standar tetap HPP kedelai. Bulog juga bersedia menyerap hasil produksi kedelai para petani sesuai HPP. Pemerintah akan membeli kedelai petani seharga Rp 7.500/kg. Pembelian akan dilakukan melalui Perum Bulog di setiap daerah." kata Mentan

Penugasan Bulog untuk menyerap kedelai petani merupakan salah satu langkah mencegah para tengkulak di tiap daerah memainkan harga. Selain itu, penugasan Bulog juga menjadi sarana ketahanan pasokan (buffer stock) kedelai di dalam negeri. Untuk itu Mentan mengimbau para petani tidak menjual kedelai ke tengkulak, tapi menjual kedelai secara langsung ke Bulog."Agar harga kedelai bisa stabil dan tidak merugikan petani, maka petani harus menjual ke Perum Bulog. Dan Perum Bulog siap membeli seharga Rp 7500 untuk satu kilogram kedelai. Tentu kadar airnya harus benar-benar sedikit sesuai standar Perum Bulog," kata Mentan.

Dengan upaya pemerintah dalam mendorong produksi kedelai, maka diharapkan para petani juga memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep hal tersebut. "Kami berpihak pada para petani. Sebab kedelai memang harus ditingkatkan produksinya seiring kebutuhan konsumsi yang besar. Sampai saat ini kita masih impor kedelai, meski potensi untuk memproduksi sendiri bisa," kata Mentan.

Selandia Baru Tingkatkan Investasi Peternakan Sapi, Industri Susu dan Terima Ekspor Manggis Indonesia

"Melalui Agricultural Working Group Meeting Indonesia berharap Selandia Baru meningkatkan investasi di bidang peternakan sapi dan menerima ekspor manggis sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Offcial Assurance Programme for the Export of Fresh Mangosteen Fruit from Indonesia to New Zealand"

Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Perdagangan Selandia Baru telah bersepakat meningkatkan hubungan kerja sama, khususnya di sektor pertanian. Kesepakatan dilakukan melalui *Agricultural Working Group Meeting*, baik di sektor capacity building, akses pasar, pertukaran teknologi dan expertise maupun perdagangan komoditi pertanian, khususnya peternakan sapi dan industri

PERPUSTAKAAN SERPUL BADAN LITBANG PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

susu. hal tersebut dikatakan Menteri Pertanian Suswono saat konferensi pers di Kanpus Kementan (18/11).

"Indonesia adalah pasar besar yang jumlah penduduknya juga besar dan pertumbuhan ekonominya sekitar 6 persen pertahun. Indonesia berharap Selandia Baru meningkatkan investasi langsung di Indonesia, khususnya di bidang peternakan sapi potong dan sapi perah termasuk industri pengolahannya" kata Mentan

Mentan mendesak pemerintah Selandia Baru agar pelaku swastanya mau berinvestasi peternakan sapi di Indonesia. Mesti diakui tidak bisa memaksa kalangan swasta, tetapi pemerintah Selandia Baru berjanji akan berusaha menjadi fasilitator yang baik. "Untuk Selandia Baru, kami terbuka khususnya juga untuk sapi potong. Kami pada dasarnya membuka investasi untuk on farm khususnya untuk sapi potong" ujar Mentan .

Mentan menuturkan seiring dengan meningkatnya jumlah kalangan menengah atas di Indonesia, maka kebutuhan daging sapi di Indonesia juga semakin meningkat. Indonesia masih bermasalah terutama menyangkut urusan populasi sapi potong yang terus berkurang. " Calon investor asal Selandia Baru diharapkan dapat membangun peternakan sapi di Indonesia. Hal itu karena potensi konsumsi daging sapi dan susu di tanah air sangat besar seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat golongan menengah " tutur Mentan

Diakui Mentan, Indonesia membutuhkan kerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan susu maupun daging di pasar dalam negeri. Selama ini Selandia Baru diuntungkan karena rutin mengekspor produk daging sapi beku ke Indonesia, untuk itu Mentan berharap pihak Selandia Baru selain dapat mengembangkan peternakan, juga bisa mengekspor sapi betina produktif hidup ke Indonesia.

"Pemerintah ingin menambah populasi terutama betina produktif hidup yang diekspor ke Indonesia. mengingat kebutuhan pangan kita terhadap daging akan terus meningkat dengan demikian tentunya volume dagingnya juga harus semakin banyak" kata Mentan.

Selain mendesak investasi sapi potong di Indonesia, Mentan juga meminta Selandia Baru mau membangun peternakan khusus sapi perah untuk menghasilkan susu. Potensi konsumsi susu sapi di Indonesia terus meningkat namun berbanding terbalik dengan jumlah peternakan sapi yang ada.

"Selandia Baru memandang Indonesia dapat menjadi prioritas berikutnya setelah China. Di China, Selandia Baru telah berinvestasi dalam industri pengolahan susu, sedangkan investasi di Indonesia khususnya dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan susu nasional karena 70% kebutuhan susu untuk masyarakat Indonesia masih harus impor salah satunya dari Selandia Baru. Oleh karena itu yang kita harapkan, tidak hanya pabrik susunya tetapi justru di on farmnya yaitu membangun peternakan untuk menghasilkan susu " kata Mentan.

Mentan mengaku dalam waktu dekat salah satu perusahaan besar industri pengolahan susu asal Selandia Baru yaitu *Fonterra Co-operative Limited,* yang akan membangun pabrik susu di Karawang, Jawa Barat. Diharapkan Selandia Baru tidak hanya mendirikan pabrik susu di Indonesia tapi juga membangun peternakan, mengingat 70% produk susu masih impor dari Selandia Baru."Kami tidak berharap mereka hanya membangun pabrik pengolahan, tapi juga on farm di peternakan sapi potong misalnya. Sebab Selandia Baru merupakan pemimpin pasar di sapi potong sehingga sangat terbuka peluang itu," kata Mentan.

Harapan Mentan dapat membangun peternakan di Indonesia, akan ditindak lanjuti dengan penyediaan lahan peternakan yang memang menjadi kebutuhan utama." Peternakan yang dibangun oleh Selandia Baru memang membutuhkan lahan yang sangat luas. Di negara tersebut, mereka punya padang rumput yang sangat luas. Jadi sapi makan rumput saja sudah cukup dan bobot sapi potongnya bisa di atas 500 kilogram (kg)," ungkap Mentan..

Pada bagian lain Mentan menjelaskan pertemuan bilateral Indonesia-Selandia Baru, selain kesepakatan di bidang peternakan sapi dan industri susu, Pemerintah Selandia Baru juga sepakat untuk menerima ekspor manggis dari Indonesia. Buah manggis asal Indonesia akhirnya diizinkan masuk ke Selandia Baru. Untuk pertama kalinya, Indonesia akan mengeksor buah manggis ke Selandia Baru. Kerjasama perdagangan tersebut terbuka setelah keluarnya izin dari pemerintah Selandia Baru yang merestui ekspor komoditas manggis Indonesia ke negara tersebut. "Selama ini manggis kita memang belum pernah masuk ke Selandia Baru, dan baru sekarang ini. Mereka sudah menerima dengan ekspor

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

manggis kita artinya sudah disetujui dari sisi keamanan pangan sesuai dengan prosedur negara itu. Jadi sudah tidak ada lagi hambatan untuk mengekspor manggis ke Selandia Baru. Negara tersebut mau menerima ekspor manggis dari Indonesia. Selain manggis, kita berharap akan dapat mengekspor salak dan mangga ke Selandia Baru" kata Mentan

Mentan mengatakan, kesepakatan tersebut telah tertuang dalam *Offcial Assurance Programme for the Export of Fresh Mangosteen Fruit from Indonesia to New Zealand.* Pengiriman dari Indonesia ke Selandia Baru pun sudah langsung dimulai ketika perjanjian tersebut diteken.

"Terhitung mulai 13 November 2013 Indonesia bisa mengekspor manggis ke Selandia Baru. Tantangan saat ini adalah bagaimana memenuhi permintaan Selandia Baru karena manggis adalah buah musiman. Manggis dikenal sebagai "ratu buah" yang tumbuh di daerah beriklim tropis. Sehingga, manggis tidak dapat tumbuh di Selandia Baru yang beriklim subtropis" kata Mentan.

Mentan berjanji bakal berjuang meloloskan komoditas pangan lain untuk masuk pasar Selandia Baru. Diantara sejumlah komoditas tersebut, buah salak dan mangga diharapkan segera menyusul manggis masuk ke pasar Selandia Baru. "Potensi ekspor salak dan mangga ke sana cukup besar, makanya ini yang nanti kami bahas dalam pertemuan berikutnya dalam sesi working group. Saya harap mereka bisa menerima komoditas ini," papar Mentan.

Selain mengekspor buah yang dijuluki queen of the tropical fruits ini, pemerintah Indonesia juga berencana mendorong ekspor buah tropis lainnya, seperti salak dan mangga, untuk masuk ke Selandia Baru. "Manggis memang sudah lolos, menyusul nanti salak dan mangga. Mudah-mudahan dalam tahun ini terus dibahas," ujar Mentan.

Mentan menilai Selandia Baru memang sudah seharusnya membuka pintu gerbang perdagangan bagi produk pangan Indonesia karena negara penghasil susu tersebut sangat banyak menikmati perdagangan ekspor daging ke Indonesia. Meski diakui, Selandia Baru untuk saat ini baru mengizinkan masuknya produk manggis ke negara tersebut, tetapi Pemerintah negara tersebut berjanji akan memberikan lebih banyak kemudahan bagi produk pangan Indonesia jika ekspor manggis kali ini bisa diikuti dengan upaya mempertahankan standar yang berlaku. "Mereka kan sudah banyak menikmati ekspor daging ke kita, jadi seharusnya dia juga mengimpor produk pangan kita, supaya balance. Dan untuk sementara ini baru manggis," ucap Mentan.

Tak hanya terkait penerimaan ekspor manggis, Selandia Baru juga berjanji bakal memberikan pelatihan peningkatan kapasitas dengan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia untuk berlatih di negaranya.

Pentingnya Perda UU Perlindungan Lahan dan Penggunaan Pupuk Hayati Oleh Petani

"Undang-Undang (UU) perlindungan lahan produktif pertanian di setiap daerah sudah berjalan,namun implementasinya masih terbentur dengan otonomi daerah dan kepentingan Pemda. Padahal UU itu harus ada Perda dari Pemda-nya. Sedangkan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman maka diharapkan petani menggunakan pupuk hayati"

Kementerian Pertanian mencatat tiap tahunnya terjadi konversi lahan pertanian hingga 100 ribu hektare. Jika tidak segera dicegah maka optimalisasi pembangunan pertanian di sejumlah daerah pun akan berkurang dengan sendirinya. Untuk itu Kementerian Pertanian telah mempunyai cara jitu agar konversi lahan mampu dikurangi sehingga potensi pertanian Indonesia dapat dimaksimalkan.

"Ancaman ke depan adalah konversi lahan menjadi non pertanian. Saya berharapnya tidak ada alih fungsi lahan dulu. Bagaimana mau meningkatkan produksi tapi lahannya sendiri selalu dikonversi menjadi non pertanian" kata Menteri Pertanian Suswono saat temu lapangan usai Panen Raya Kedelai, di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (2/11).

Menurut Mentan, Pemerintah sendiri sudah ada undang-undang (UU) yang mengatur agar lahan-lahan produktif itu menjadi pertanian. Namun kendalanya, beberapa Pemda tidak mengeluarkan Perda mengenai hal tersebut, "UU itu harus ada Perda dari Pemda-nya. Makanya saya harapkan Pemda itu mengeluarkan Perda agar lahan produktif lahan pertanian diamankan. Produksi bagus tapi lahan tiap tahun terkonversi ya sama saja tidak akan membangun pertanian Indonesia," ucap Mentan.

Mentan menjelaskan, seiring berjalannya otonomi di setiap daerah membuat Pemda memiliki aturan dan kebijakan tersendiri dalam mengurus wilayahnya. UU perlindungan lahan produktif pertanian telah ada, tetapi masih perlu adanya dorongan aturan turunan dari Pemda."Meski dalam undang-undang (UU) terdapat

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

kewajiban untuk melindungi lahan produktif pertanian di setiap daerah sudah berjalan. Namun implementasinya masih terbentur dengan otonomi daerah dan ego kepentingan Pemda" jelas Mentan.

Mentan mencatat baru sekitar 190 Kabupaten Kota yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Itupun belum mendorong semangat pemerintah untuk mendorong produksi pertanian tiap daerah bagi kepentingan pangan nasional.

"Dua per tiga Kabupaten Kota masih belum menerbitkan Perda yang mengacu UU agar bisa melindungi lahan pertanian. Kalau pun ada saya sangat sayangkan karena lahan pertanian dipakai hanya bagi kepentingan daerah bersangkutan," kata Mentan

Pemerintah dalam waktu dekat akan menerbitkan moratorium konversi lahan di seluruh wilayah Indonesia guna mengoptimalkan lahan produktif pertanian. Moratoruium ini akan diupayakan dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres).

"Peran pemerintah daerah (Pemda) menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan lahan-lahan pertanian di tiap daerah. Oleh karena itu Kementan sedang mengupayakan dengan menyiapkan Inpres moratorium konversi lahan. diharapkan dengan kebijakan tersebut alih fungsi lahan berjalan optimal ke depannya" harap Mentan.

Mentan juga mengharapkan melalui temu lapangan di Mojokerto diperoleh sejumlah invensi pupuk hayati unggulan yang siap dipromosikan, dilisensi, diproduksi dan dikembangkan kepada petani oleh para lisensor. Langkah tersebut untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan berbagai produk hayati dari berbagai lembaga riset dan menghimpun masukan dari kalangan Peneliti dan Pebisnis.

"Dengan penggunaan pupuk hayati diharapkan kita bisa bersaing, dan itu sudah diterapkan di sini. Manfaat pupuk hayati sendiri sesungguhnya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang mampu meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman." ucap Mentan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Balitbang, Kementan, Haryono mengatakan Badan Penelitian, Kementerian Pertanian sedang melakukan sosialisasi manfaat pupuk hayati pada pertumbuhan tanaman komoditas pangan di Mojokerto, Jawa Timur. "Manfaat pupuk hayati atau pupuk mikroba dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk organik. Contohnya saja pupuk hayati yang mengandung mikroba penambat N , pelarut fosfat, penghasil zat pemacu tumbuh, pengendali cekaman lingkungan dan patogen," kata Kepala Badan Litbang.

Kepala Badan Litbang menambahkan, penggunaan pupuk hayati yang mengandung bakteri penambat N mampu menghemat penggunaan pupuk urea sampai 50%. Dan bahkan penggunaan bakteri penambat N simbiotik (Rhizobium) pada tanaman legum tidak memerlukan pupuk urea.

"Sementara dengan penggunaan pupuk hayati dengan mikroba pelarut P mampu melepaskan unsur P yang diikat tanah. Kemudian pupuk hayati pemacu tumbuh tanaman bahkan mampu meningkatkan kebugaran tanaman dan membantu tanaman menghadapi cekaman lingkungan ekstrem seperti kekeringan, genangan, salinitas, dan lain-lain," tutur Kepala Badan Litbang.

Meski demikian Kepala Badan Litbang mengakui, hingga kini petani lebih suka menggunakan pupuk anorganik dibanding dengan pupuk alternatif lainnya. Petani sudah sangat bergantung pada pupuk anorganik, sehingga bila terjadi kelangkaan pasokan pupuk membuat petani menjadi panik.

"Oleh karena itu sosialisasi dari pemerintah khususnya daerah perlu mendorong penggunaan. pupuk hayati agar petani bisa mengoptimalkan hasil produktivitas tanamannya," ucap Kepala Badan Litbang.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BIRO UMUM DAN HUMAS
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM, No. 3 Jakarta Selatan
Telp./Fax (021) 780 4457 (ext.2316)